

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2017

Determinant Factors on Regional Inequality in Eastern Indonesia in 2012-2017

¹Titian Hasanah, ²Asnita Frida Sebayang, ³Aan Julia

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹titiannhasanah@gmail.com, ²fridaasnita@gmail.com, ³aan.unisba@gmail.com

Abstract. Regional inequality is a common phenomenon that occurs in the process of economic development in a region. This imbalance is basically due to differences in the content of natural resources and differences in the demographic conditions found in each region. This condition results in differences in the ability of an area in the development process. The Eastern Region of Indonesia is also an area that is still experiencing problems of inequality. This imbalance can be seen from the smaller per capita GRDP compared to the Western Region of Indonesia. This study uses quantitative methods. This study aims to calculate the number of regional inequality by using Theil Index, and to determine the effect of labor variables, general allocation funds and investments using panel data regression from 2012-2017 in 16 provinces. Processing this data using the Eviews 7 program. The research results show that inequality in Eastern Indonesia is still high. Labor has a positive and significant influence on regional inequality. DAU has a negative and significant influence on regional inequality. Investment does not significantly influence regional inequality.

Keywords: Inequality, Labor, DAU, Investment.

Abstrak. Ketimpangan wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Kondisi ini mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan. Kawasan Timur Indonesia juga merupakan kawasan yang masih mengalami permasalahan ketimpangan. Ketimpangan ini dapat dilihat dari PDRB per kapita yang lebih kecil dibandingkan Kawasan Barat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung angka ketimpangan wilayah dengan menggunakan Indeks Theil, serta untuk mengetahui pengaruh variabel tenaga kerja, dana alokasi umum dan investasi dengan menggunakan regresi data panel dari tahun 2012-2017 pada 16 provinsi. Pengolahan data ini menggunakan program Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di KTI masih tergolong tinggi. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Kata Kunci: Ketimpangan, Tenaga Kerja, DAU, Investasi.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah (Dedi, 2011).

Ketimpangan antar wilayah/daerah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat daerah relatif maju (*developed region*) dan daerah relatif terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2018).

Permasalahan ketimpangan antar wilayah menjadi isu utama dalam pembangunan wilayah nasional. Permasalahan ketimpangan ini masih belum terselesaikan hingga sekarang. Negara belum mampu mengelola kandungan kekayaan alam yang sangat besar untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah dan ketidakmerataan pendapatan nasional khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang salah satunya dilihat dari kontribusi PDRB terhadap PDB, dimana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah

berkurang dari 80 persen terhadap PDB. Sampai saat ini fokus utama pembangunan wilayah nasional adalah upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah KTI yang terdiri dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. (RPJMN 2015- 2019).

Ketimpangan yang terjadi antarwilayah di Indonesia tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Dalam konteks kenegaraan, ketimpangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam keutuhan suatu negara. Ketimpangan antarwilayah juga dapat mengakibatkan instabilitas. Ketimpangan antarwilayah yang terjadi di Indonesia selain mengakibatkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga dapat mendorong timbulnya kecemburuan sosial dari masyarakat di wilayah yang kurang berkembang terhadap masyarakat yang lebih maju. Perhatian terhadap upaya pengurangan ketimpangan wilayah perlu menjadi prioritas pembangunan. Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, ketimpangan antarwilayah tetap harus diupayakan untuk dikurangi (Bappenas, 2017). Maka dari itu ketimpangan antarwilayah sangat penting untuk dikaji.

Penelitian - penelitian mengenai ketimpangan wilayah telah banyak dilakukan. Terdapat tiga variabel yang dianggap dalam beberapa penelitian dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah, yakni variabel tenaga kerja, dana alokasi umum dan investasi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggunakan ketiga variabel tersebut untuk di uji pengaruhnya terhadap

ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

B. Landasan Teori

Pembangunan Daerah

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Dwi, 2017).

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan antar wilayah berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah (Herwin, 2010). Menurut Sjafrizal (2018), ketimpangan antar wilayah merupakan fenomena umum yang tidak saja terjadi pada negara berkembang tetapi pada negara maju pun walaupun dengan

tingkat ketimpangan yang berbeda. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah adalah (1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam, (2) Perbedaan Kondisi Demografis, (3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa, (4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah, (5) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah.

Model Neo Klasik

Pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara sedang berkembang umumnya cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk, biasanya merupakan faktor utama yang menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah. Sedangkan di negara-negara maju, proses penyesuaian tersebut terjadi dengan lancar karena telah tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2018).

Indeks Theil

Salah satu indeks yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Theil. Data yang digunakan dalam indeks Theil yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk antar daerah. Penafsirannya yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat

tinggah dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Theil index (T_d) adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2018):

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[\frac{y_{ij}/Y}{n_{ij}/N} \right]$$

Dimana :

y_{ij} : = PDRB per kapita provinsi

Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi

n = Jumlah penduduk provinsi

N = Jumlah penduduk seluruh provinsi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kondisi ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia dan hasil pengolahan panel data untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di KTI.

Tabel 1. Ketimpangan Kawasan Timur Indonesia Menurut Indeks Entropy Theil, 2012-2017

Tahun	Indeks Theil
2012	1.59
2013	1.59
2014	1.65
2015	1.61
2016	1.59
2017	1.57
Rata-Rata KTI	1.6

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Kondisi Ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia

Berikut adalah perhitungan menggunakan Indeks Theil. Hasil perhitungan dijelaskan pada tabel berikut :

Hasil dari tahun ke tahun menunjukkan nilai ketimpangan yang melebihi angka satu yang artinya terjadi ketimpangan yang melebar atau sangat timpang. Dari tahun 2012-2014 terjadi peningkatan nilai Indeks Theil, kemudian di tahun selanjutnya hingga tahun 2017 nilai Indeks Theil cenderung menurun. Perbedaan nilai ketimpangan tersebut disebabkan dari hasil perhitungan ketimpangan bahwa beberapa provinsi mengalami peningkatan dan penurunan angka ketimpangan yang pada akhirnya nilai ketimpangan tersebut mempengaruhi nilai ketimpangan Kawasan Timur Indonesia.

Berikut ini ditampilkan nilai Indeks Theil antar wilayah provinsi tahun 2012-2017.

Tabel 2. Indeks Theil per Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, 2012-2017

Provinsi	Indeks Theil						Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Nusa Tenggara Barat	0.34	0.34	0.34	0.43	0.44	0.41	0.38
Nusa Tenggara Timur	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18
Kalimantan Barat	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63
Kalimantan Tengah	1.21	1.22	1.22	1.23	1.24	1.25	1.23
Kalimantan Selatan	0.9	0.9	0.88	0.86	0.86	0.86	0.88
Kalimantan Timur	6.51	6.15	7.17	6.81	6.35	6.15	6.52
Kalimantan Utara	5.55	5.54	5.5	5.23	5.02	4.96	5.3
Sulawesi Utara	1.06	1.08	1.09	1.11	1.15	1.18	1.11
Gorontalo	0.79	0.81	0.82	0.83	0.85	0.87	0.83
Sulawesi Tengah	0.87	0.92	0.91	1.03	1.1	1.13	0.99
Sulawesi Selatan	0.57	0.6	0.61	0.64	0.68	0.71	0.64
Sulawesi Barat	0.72	0.8	0.81	0.84	0.85	0.87	0.82
Sulawesi Tenggara	1.08	1.09	1.08	1.1	1.12	1.13	1.1
Maluku	0.5	0.5	0.5	0.5	0.51	0.51	0.5
Maluku Utara	0.73	0.73	0.72	0.77	0.72	0.74	0.74
Papua	1.6	1.65	1.59	1.62	1.71	1.69	1.64
Papua Barat	3.81	3.83	3.75	3.66	3.6	3.51	3.69

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Tabel 2 mengindikasikan bahwa perbedaan nilai rata-rata ketimpangan antar wilayah selama periode 2012-2017 sangat jauh berbeda. Tingkat ketimpangan di beberapa provinsi Kawasan Timur Indonesia mencerminkan ketimpangan yang tinggi karena mencapai angka lebih dari satu diantaranya adalah provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Nilai ketimpangan tertinggi selama periode penelitian terdapat di provinsi Kalimantan Timur sebesar 6.52 sementara nilai ketimpangan terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.18. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan di suatu daerah tidak menjamin adanya pemerataan di daerah tersebut. Provinsi Kalimantan Timur memiliki karunia sumber daya alam berlimpah yang umumnya bersifat

tidak terbarukan (*unrenewable resources*), sehingga kegiatan ekonominya berkembang dengan cara memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) tersebut, terutama sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang memberikan kontribusi (*share*) terbesar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, bahkan komoditi ekspornya didominasi barang-barang hasil sektor pertambangan dan penggalian (Fitriadi, 2016).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang menghasilkan PDRB per kapita tertinggi di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan jumlah penduduk terbesar keenam se-Kawasan Timur Indonesia dan setiap tahunnya jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Tingginya

PDRB per kapita dan jumlah penduduk diiringi dengan ketimpangan yang tinggi secara regional. Ini menunjukkan nilai produksi yang tinggi secara persamaan pendapatan per kapita yang tinggi tidak terbagi secara merata. Artinya besarnya pendapatan wilayah tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk yang berpendapatan menengah ke atas sedangkan mereka yang tergolong menengah ke bawah tidak tersentuh oleh proses pembangunan.

Hasil Pengolahan Panel Data Menggunakan *Fixed Effect Model*

Model penelitian yang digunakan bertujuan untuk melakukan estimasi dan untuk melihat pengaruh serta keterkaitan antara variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah yang dalam hal ini digunakan nilai Indeks Theil, dengan variabel-variabel independen yaitu variabel tenaga kerja, dana alokasi umum dan investasi. Pada analisis regresi, perhitungan hanya dilakukan untuk 16 provinsi karena provinsi Kalimantan Utara adalah daerah pemekaran baru yang data statistik beberapa variabelnya belum tersedia. Berikut hasil estimasi penelitian menggunakan *eviews 7* :

Tabel 3. Hasil Estimasi

Variabel Dependen : IET		Total Observasi : 96	
Variabel Independen	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	6.619409	-2.181594	0.0322
LNTK	0.736054	3.214878	0.0019
LNDAU	0.170158	-4.764491	0
LNINVES	0.007464	0.633795	0.5281
R-Squared		0.997095	
F-Statistic		1468.465	
Prob (F-Stat)		0.000000	

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *Eviews, 2018*

Uji T Statistik

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja

dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah sedangkan variabel investasi tidak signifikan. Nilai probabilitas variabel tenaga kerja adalah 0.0019, lebih kecil dari nilai signifikan yakni 0.05. Ini memiliki arti bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

Nilai probabilitas variabel dana alokasi umum adalah 0.0000, lebih kecil dari nilai signifikan yakni 0.05. Ini memiliki arti bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Nilai probabilitas investasi adalah 0.5281, lebih besar dari nilai signifikan yakni 0.05. Ini memiliki arti bahwa variabel investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan wilayah di KTI.

Uji F-Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi model regresi diperoleh nilai F-Statistik yaitu 1468.465 nilai ini lebih besar dari F-tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df untuk pembilang (N_1) $k-1 = 3-1 = 2$ dan df untuk penyebut (N_2) $n-k = 96-3 = 93$ yaitu sebesar 3.09 sehingga $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$, yang artinya H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas (tenaga kerja, dana alokasi umum dan investasi) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (ketimpangan wilayah) pada tingkat kepercayaan 95%.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui nilai R^2 adalah sebesar 0,997095 Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen pada model ini mampu menjelaskan atau dapat mempengaruhi variabel dependennya sebesar 99,70%, sedangkan 0,30% dijelaskan oleh

faktor-faktor lain di luar model.

Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil panel data dengan FEM, nilai koefisien yang didapatkan dari hasil estimasi pada variabel tenaga kerja yaitu sebesar 0.736054 dan memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini bermakna bahwa setiap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1% maka ternyata akan dapat meningkatkan ketimpangan antar wilayah di KTI sebesar 0,736 poin sesuai nilai koefisien yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di Kawasan Timur Indonesia adalah tenaga kerja yang masih memiliki kualitas yang rendah, sedangkan tenaga kerja yang berasal dari kawasan tersebut dan memiliki kualitas SDM yang baik lebih memilih untuk bekerja di Pulau Jawa.

Kenaikan tenaga kerja yang diiringi dengan kenaikan ketimpangan wilayah harus dapat ditangani oleh pemerintah. Pemerintah harus banyak melakukan intervensi terkait ketenagakerjaan salah satunya adalah dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pengembangan sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah. Pengetahuan dan keterampilan teknologi perlu ditingkatkan agar mendukung proses pengembangan sektor unggulan sehingga tenaga kerja yang diambil tidak perlu dari luar daerah.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknologi dapat dicapai melalui peningkatan capaian aspek pendidikan seperti pemberian bantuan biaya pendidikan, pemberian bantuan fasilitas transportasi untuk bersekolah, pemberian bantuan penyediaan prasarana dan sarana sekolah maupun advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah

adalah dengan memberikan pelatihan atau pendampingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi sektoral. Wilayah KTI memiliki potensi ekonomi sektoral yang cukup tinggi khususnya di sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan akomodasi (Bank Indonesia, 2018).

Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Wilayah

Pada variabel dana alokasi umum diperoleh hasil regresi dengan nilai koefisien sebesar -0.170158 dan berpengaruh secara signifikan terhadap $\alpha = 5\%$ yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal tersebut bermakna bahwa setiap kenaikan atau peningkatan jumlah dana alokasi umum sebesar 1% rupiah maka akan mengurangi tingkat ketimpangan pada wilayah KTI sebesar nilai koefisien tersebut yaitu 0,170 poin. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah memberikan peningkatan ekonomi daerah dikarenakan pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi mengenai kebutuhan daerahnya. Maka dari itu pemerintah kedepannya diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Dana Alokasi Umum di wilayah-wilayah KTI sehingga nantinya ketimpangan di wilayah-wilayah tersebut dapat semakin diturunkan.

Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil regresi dalam model penelitian pada variabel investasi yang kaitannya terhadap pengurangan ketimpangan wilayah diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.5281. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi tidak memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengukuran ketimpangan yang dilakukan melalui perhitungan indeks theil menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia masih tergolong tinggi. Rata-rata ketimpangan wilayah di dalam Kawasan Timur melebihi angka satu pada periode 2012-2017. Selanjutnya ketimpangan antar wilayah provinsi di Kawasan Timur Indonesia juga masih tergolong tinggi. Terdapat provinsi yang memiliki angka Indeks Theil melebihi angka 1, diantaranya adalah provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.
2. Variabel tenaga kerja dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan memiliki nilai koefisien positif (+) yang artinya setiap kenaikan tenaga kerja akan menyebabkan ketimpangan semakin tinggi. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan memiliki nilai koefisien negatif (-), yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan jumlah DAU maka dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di KTI. Sementara variabel terakhir investasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di

Kawasan Timur Indonesia.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat memperdalam penelitian dengan penambahan tahun penelitian, serta mencoba pada daerah yang lain untuk melihat tingkat ketimpangan pembangunan pada suatu daerah.
2. Bagi pemerintah, berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel tenaga kerja dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah sebaiknya memperhatikan kedua variabel tersebut untuk membuat kebijakan yang sesuai dalam pengurangan ketimpangan wilayah. Pemerintah harus fokus dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik itu dalam hal upaya peningkatan pendidikan maupun pelatihan keterampilan masyarakat agar kedepannya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor unggulan berasal dari masyarakat daerah itu sendiri dan bukan berasal dari luar Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan fungsi dana alokasi umum agar ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia dapat semakin berkurang.

Daftar Pustaka

- Ardiowati, Dwi, Asnita Frida Sebayang dan Noviani. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi ISSN 2460-6553

- Volume 3 No 1 Tahun 2017
Universitas Islam Bandung.
- Bank Indonesia. 2018. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional : Laporan Nusantara November 2018*. Volume 13 No 4. Jakarta.
- Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. 2017. *Laporan Akhir Prakarsa Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Pembangunan Daerah Tahun 2017*. Jakarta.
- Fitriadi. 2016. *Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Forum Ekonomi Vol 17 No.2 Agustus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- Mopangga, Herwin. 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Setiono, Dedi. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah: Teori dan Analisis*. LP. FE UI. Jakarta.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.